

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Collaborative Governance merupakan pendekatan yang penting dalam kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, maka implementasi kebijakan perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kolaborasi antara berbagai pihak dapat memperkuat kerja sama, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, perlindungan sosial di Kabupaten Karimun dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Maka dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Kondisi eksisting kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun telah menunjukkan hasil yang positif dalam pencapaian target dan kinerja. Program-program seperti Rehabilitasi Sosial, Penanganan Bencana, dan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial telah berhasil memberikan bantuan dan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti penyandang distabilitas, korban bencana, dan keluarga miskin. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga sosial, dan masyarakat dalam implementasi kebijakan perlindungan sosial menjadi faktor penting dalam mencapai hasil yang positif. Berbagai kegiatan yang dilakukan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pendataan fakir miskin, dan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga telah berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan kelompok rentan di masyarakat. Dengan adanya kerja sama yang efektif dan

kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak terkait, program-program perlindungan sosial di Kabupaten Karimun mampu memberikan dampak yang positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat dari risiko sosial. Alokasi dana yang diterima dari pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat turut berperan dalam kesuksesan kebijakan perlindungan sosial di daerah tersebut.

2. Analisa *Collaborative Governance* pada Teori Ansel & Gash (2008) dalam kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun merupakan suatu upaya yang penting untuk memastikan efektivitas dan kesuksesan kebijakan tersebut.

Kondisi Awal dalam Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada **Proses Kolaborasi** sebagai upaya yang lebih besar perlu dilakukan untuk meningkatkan kerja sama, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar berbagai pihak terkait. Kemudian, pembenahan pada perangkat bawah seperti RT dan perbaikan dalam sistem distribusi bansos juga perlu dilakukan. **Fasilitas Kepemimpinan** yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan **Desain Kelembagaan** yang efisien juga menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan sosial.

5.2. Saran

1. Untuk lebih memperkuat keberlangsungan dan efektivitas program perlindungan sosial di Kabupaten Karimun, penting untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara semua pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga sosial, dan

masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang telah dijalankan, serta memperhatikan masukan dan feedbacknya dari masyarakat penerima manfaat agar program dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi.

2. Pentingnya untuk terus mengembangkan *Collaborative Governance* teori Ansel & Gash (2008) pada kondisi awal, proses kolaborasi, fasilitas kepemimpinan dan desain kelembagaan di mana antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan efektivitas dan kesuksesan kebijakan perlindungan sosial di Kabupaten Karimun. Perlu adanya komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk bekerja sama secara sinergis dan berkesinambungan dalam implementasi kebijakan tersebut.

5.3. Implikasi Teori

Implikasi teori merupakan konsekuensi atau dampak yang timbul dari penerapan suatu teori dalam kehidupan nyata. Implikasi teori bisa berupa saran-saran praktis yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau memprediksi suatu fenomena, serta dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik. Implikasi teori juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi atau kebijakan yang lebih efektif dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan memahami implikasi dari suatu teori, seseorang dapat lebih mudah mengaplikasikan konsep-konsep teoritis tersebut dalam konteks yang sesuai.

Implikasi dari teori *Collaborative Governance* (Ansel & Gash, 2008) dalam penelitian ini adalah pentingnya kerja sama yang sinergis antara berbagai pihak

terkait dalam implementasi program perlindungan sosial di Kabupaten Karimun. Dengan adanya kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan kebijakan perlindungan sosial dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk bekerja sama secara berkesinambungan dalam memantau dan mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan sosial tersebut.

Dengan menerapkan teori *Collaborative Governance* dalam penelitian ini, diharapkan program perlindungan sosial di Kabupaten Karimun dapat lebih terkoordinasi, efisien, dan efektif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, adanya pemantauan dan evaluasi secara berkala juga dapat membantu dalam mengevaluasi keberhasilan program-program perlindungan sosial tersebut, sehingga dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan masukan dari masyarakat penerima manfaat.